

KERJASAMA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA PADA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISPARPORA) KABUPATEN SUBANG

Iwan Henri Kusnadi¹, Rizky Prakoso², Agung Noor Khalik³

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Email: iwanhenri@unsub.ac.id, rizkyprakoso089@gmail.com, Agungkhalik@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Destinasi, Wisata, Dinas
Pariwisata, Disparpora,
Pengembangan

Perencanaan pariwisata sangat diperlukan baik pada tingkat Internasional, Nasional, Regional, Subregional dan Resort (kawasan, dan tapak), maupun desain dan perencanaan fasilitas, hal ini karena; (1) Fenomena pariwisata makin kompleks dari yang pernah terfikir sebelumnya. (2) Pariwisata berdampak positif dan negatif. (3) Pariwisata makin kompetitif dan promosi destinasi wisata makin gencar. (4) Pariwisata dapat berakibat buruk pada sumberdaya alam dan budaya. (5) Pariwisata dapat mempengaruhi semua orang dalam komunitas tertentu dan semua yang terlibat dalam pariwisata perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. (6) Pariwisata memerlukan penanganan secara khusus baik dalam aspek organisasional, marketing, promosi, maupun regulasi.

ABSTRACT

Keywords:

Destination, Tourism,
Tourism Office,
Disparpora,
Development

Tourism planning is very necessary both at the International, National, Regional, Subregional and Resort levels (regions, and sites), as well as facility design and planning, this is because; (1) The phenomenon of tourism is more complex than ever thought before. (2) Tourism has both positive and negative impacts. (3) Tourism is increasingly competitive and the promotion of tourist destinations is increasingly intensive. (4) Tourism can adversely affect natural and cultural resources. (5) Tourism can affect everyone in a particular community and all those involved in tourism need to participate in the tourism planning process. (6) Tourism requires special handling in organizational, marketing, promotional, and regulatory aspects.

PENDAHULUAN

Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah destinasi dan pengembangan pariwisata di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sumberdaya pariwisata yang beranekaragam, mulai atraksi wisata alam, atraksi wisata buatan manusia, maupun atraksi wisata budaya yang di dukung dengan kondisi lingkungan alam, sosial budaya, ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas yang mampu menopang kegiatan pariwisata, salah satunya wisata yang ada di Kabupaten Subang. Hal ini sangat sesuai dengan kebijakan Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat mengemukakan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu kegiatan prioritas diantaranya berbunyi “Pengembangan Destinasi Wisata Siap Kunjung dan Destinasi Wisata Dunia” sebagaimana ditindaklanjuti Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2025. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata merupakan rencana jangka panjang berdimensi waktu 10 tahun yang antara lain berisikan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan



untuk kemudian menjadi pedoman pengelolaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. RPJMD Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu kegiatan prioritas tepatnya berbunyi “Pengembangan Destinasi Wisata Siap Kunjung dan Destinasi Wisata Dunia”. Tujuan dari Kegiatan Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia merupakan bahan acuan bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dan Dinas kabupaten Kota di Jawa Barat yang terkait dalam Destinasi wisata dunia adalah Menyusun strategi dan kebijakan untuk menghadapi isu dan permasalahan pengembangan Destinasi wisata dunia yang maju sehingga dapat mengangkat destinasi pariwisata di Jawa Barat menjadi terkenal di dunia; dan sebagai pedoman untuk menyusun rencana aksi dalam pengembangan destinasi dunia di Jawa Barat sehingga destinasi pariwisata di Jawa Barat akan tambah maju dan berkembang mampu bersaing.

Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kabupaten/Kota merupakan kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat kabupaten/kota yang berperan dalam menjawab isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan di tingkat daerah (kabupaten/kota). Pemerintah daerah menjadi pemain utama dalam pengembangan kawasan ini, khususnya dalam hal pengelolaan daya tarik dan pembinaan masyarakat sekitar kawasan. KWU Kabupaten/Kota direncanakan dan dikembangkan oleh daerah sehingga tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan dan pengelolannya lebih besar daripada tanggung jawab pemerintah provinsi. KWU Kabupaten/Kota diidentifikasi dalam RIPPDA Provinsi, namun detail perencanaannya dijabarkan dalam RIPPDA Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau rencana pengembangan pariwisata setingkat kabupaten/kota. Pengembangan suatu KWU Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendukung pengembangan KWU Provinsi maupun KWU Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat, dalam kerangka menambah keunikan dan memperkuat daya tarik Jawa Barat. Daya tarik wisata yang dimiliki Provinsi Jawa Barat sangat beragam jenisnya. Wisata alam, budaya, maupun buatan tersebar di wilayah Jawa Barat, dengan keunikan lokal yang khas yang memperkuat daya saing produk wisata Jawa Barat. Keragaman daya tarik Jawa Barat dinyatakan dengan GURILAPS yakni Gunung, Rimba, Air, Laut, Pantai, Sungai Dan Seni Budaya. Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia yang memiliki tema wisata tertentu yang ditonjolkan, misalnya D.I. Yogyakarta dengan wisata budayanya, Provinsi Jawa Barat mengedepankan keragaman daya tarik untuk memperkuat daya saing produk wisata.

Keragaman daya tarik wisata ini menjadi tema utama dalam menentukan pengelompokan daya tarik wisata untuk membentuk kawasan wisata unggulan Provinsi Jawa Barat. Hal ini juga terkait dengan sejarah alam dan budaya Jawa Barat yang terangkum dalam sejarah Gunung Sunda, termasuk hutan, sungai, laut -dengan budaya yang berpengaruh, yaitu budaya Sunda Priangan pegunungan, budaya pesisir, dan pengaruh budaya kolonial. Wisata alam pegunungan, wisata hutan, pantai dan sungai, maupun wisata budaya yang mengangkat sejarah, seni budaya dan jati diri masyarakat Jawa Barat diangkat sebagai tema-tema produk wisata yang diunggulkan dalam setiap Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi Jawa Barat. Setiap KWU memiliki sumber daya wisata utama/kegiatan yang telah berkembang, atau sumber daya wisata lain maupun kegiatan wisata lain yang diusulkan untuk dikembangkan, serta potensi pasar wisatawan eksisting dan yang akan menjadi sasaran pasar, baik dilihat dari daerah asal wisatawan, maupun karakteristik wisatawannya. Sumber daya wisata utama suatu KWU nantinya menjadi tema produk wisata utama yang akan diunggulkan dari KWU tersebut, dan akan terkait dengan segmen pasar wisatawan yang menjadi sasaran.

Potensi dan Permasalahan Pariwisata terlihat bahwa perkembangan pariwisata yang terjadi di wilayah Jawa Barat memperlihatkan perbedaan tingkat perkembangan. Kawasan wisata padat sangat terkonsentrasi di jalur lintas tengah, yaitu Puncak dan Kota Bandung yang memiliki tingkat aksesibilitas yang sangat baik, dan merupakan jalur lintasan wisata utama Jawa Barat. Sementara, daerah selatan Jawa Barat (tidak termasuk Pangandaran), yang aksesibilitasnya masih kurang baik, kepariwisataannya relatif belum berkembang dibandingkan jalur tengah, atau bahkan jalur utara/pantura.

Perkembangan kawasan wisata unggulan Provinsi Jawa Barat terbagi mengikuti perkembangan ke-tiga jalur jalan yang terdapat di Jawa Barat, yaitu:

1. Jalur utara, dengan jalan lintas utara (pantura) sebagai unsur utama, yang mencakup seluruh atau sebagian wilayah Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka.
2. Jalur tengah, dengan jalur jalan lintas tengah sebagai unsur pengikat, yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, sebagian Kabupaten Cianjur, Kabupaten/Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, sebagian Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar.
3. Jalur selatan, dengan jalur jalan/pantai selatan sebagai unsur pengikat kawasan, yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi, bagian selatan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

Tingkat perkembangan kawasan wisata unggulan di setiap jalur berbeda-beda, tergantung dari sumber daya (termasuk sarana dan prasarana) yang dimiliki, serta aksesibilitas terhadap sumber pasar wisatawan. Suatu kawasan wisata bisa berada pada tahap awal perkembangan dan baru sedikit dikunjungi wisatawan, padahal memiliki potensi daya tarik wisata yang unik dan menarik. Kawasan wisata lain bisa telah sangat berkembang, dan bahkan mulai padat pada waktu peak season dan mulai menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan fisik maupun sosial budaya.

Potensi pariwisata di Kabupaten Subang untuk meningkatkan jumlah wisatawan (kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara) sangat besar, selain memiliki amenities yang mendukung dan pariwisata sebagai salah satu industri yang menarik dan menguntungkan. Amenitas dan industri pariwisata, selain meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Subang juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Amenitas dan industri pariwisata tersebut seperti: hotel, restoran, tempat hiburan.

Perencanaan merupakan fasilitasi atau advokasi atau intervensi yang bertujuan untuk mengubah proses yang sudah ada. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam (Riyadi & Dedy supriady; 2004:2) perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternative yang ada. Menurut Rose dalam (Tourism Planning; 2002:6) "perencanaan merupakan suatu aktifitas yang multidimensional dan berusaha bersifat integrative. Ini mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, psikologi, antropologi dan teknik dengan mempertimbangkan masa lalu, sekarang dan yang akan datang". Sedangkan unsur-unsur perencanaan adalah meliputi; (1) Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Dengan demikian berarti perencanaan yang disusun harus didasarkan pada asumsi-asumsi yang didukung oleh fakta atau bukti yang ada, karena perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan

suatu kegiatan atau aktifitas. (2) Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. (3) Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan. (4) Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi jika pada saat pelaksanaan rencana akan ada kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan. (5) Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan. (LAN-DSE, 1999)

Esensi dari perencanaan adalah: (1) Mengidentifikasi pendekatan alternatif. (2) Membuat sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. (3) Membuat sesuatu yang lain daripada sebelumnya. (4) Membuat sesuatu harus tepat seperti yang diinginkan. (5) Membuat sesuatu seperti yang sedang berjalan atau berkembang apa adanya. (6) menemukan ketidak tepatan rencana. (7) mempertahankan keunikan. (8) Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

Mengapa perlu perencanaan pariwisata?. Perencanaan pariwisata sangat diperlukan baik pada tingkat Internasional, Nasional, Regional, Subregional dan Resort (kawasan, dan tapak), maupun desain dan perencanaan fasilitas, hal ini karena; (1) Fenomena pariwisata makin kompleks dari yang pernah terfikir sebelumnya. (2) Pariwisata berdampak positif dan negatif. (3) Pariwisata makin kompetitif dan promosi destinasi wisata makin gencar. (4) Pariwisata dapat berakibat buruk pada sumberdaya alam dan budaya. (5) Pariwisata dapat mempengaruhi semua orang dalam komunitas tertentu dan semua yang terlibat dalam pariwisata perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. (6) Pariwisata memerlukan penanganan secara khusus baik dalam aspek organisasional, marketing, promosi, maupun regulasi.

Konsekuensi dari pengembangan pariwisata tanpa perencanaan pasti akan dapat menyebabkan dampak fisik, dampak sosial budaya (manusia), dampak pemasaran yang berlebihan atau kurang, dampak pengorganisasian yang kurang dan dampak lainnya (1) dampak fisik dapat menyebabkan misalnya kerusakan atau perubahan permanen lingkungan fisik, kerusakan atau perubahan permanen monumen sejarah, kepadatan dan penuh sesak, polusi, masalah lalu lintas dan sebagainya. (2) dampak manusia seperti; dinamika kebudayaan, efek demonstrasi, ketergantungan pada pariwisata, kebencian terhadap wisatawan, kehilangan identitas lokal, kesenjangan sosial, kurangnya kesadaran akan keuntungan adanya pariwisata di destinasi. (3) dampak pemasaran misalnya; kesalahan memperhitungkan peluang pemasaran, merosotnya saham wisata karena usaha destinasi saingan, kurang cukup kesadaran untuk memasarkan di pasar-pasar utama, kurang jelas citra destinasi di pasar-pasar potensial, kurangnya kerjasama promosi antar aktor pariwisata, tidak cukup kemampuan untuk melihat peluang dalam menyusun paket wisata. (4) dampak pengorganisasian yaitu pendekatan yg terpecah-pecah dalam pemasaran dan pengembangan pariwisata, sering adanya persaingan di antara kelompok yang memisahkan diri, tidak ada kerjasama antar aktor pariwisata, kurangnya segmentasi dalam minat industri pariwisata, tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak bertindak terhadap isu, problem dan peluang yang ada. (5) dampak lainnya yaitu; tidak cukup acara pertunjukan, tidak banyak atraksi wisata, lama tinggal pendek, mutu fasilitas dan pelayanan buruk atau menurun, pelayanan informasi wisata buruk dan tidak cukup.

Dalam kaitan perencanaan destinasi wisata terlihat perencanaannya belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator masalah sebagai berikut :

1. Destinasi dan pengembangan pariwisata di Subang masih belum didukung dengan penyesuaian rencana infrastruktur yang mempercepat pengembangan destinasi wisata, misalnya sarana transportasi ke arah destinasi wisata yang masih terbatas, layanan prasarana rest area yang menjadi daya tarik ke arah destinasi wisata belum optimal dan lain-lain.
2. Konsistensi perencanaan dan penganggaran selalu menjadi kendala dalam mengembangkan destinasi wisata yang diprogramkan apalagi dengan terjadinya pandemic 19 dihadapkan kepada keterbatasan anggaran.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan destinasi wisata, khususnya peran perusahaan, atau swasta.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk Menyusun tulisan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul Kerjasama Pengembangan Destinasi Wisata Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Subang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penilaian Perencanaan Pengembangan Destinasi Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Subang yaitu menurut Sjafrizal (2016:130) tentang Syarat-syarat suatu perencanaan yang baik sebagaimana dibahas sebagai berikut :

1. Perencanaan harus berorientasi pada pelaksanaan.

Untuk dapat mewujudkan perencanaan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Subang yang berorientasi pada pelaksanaan, maka hal pertama yang perlu diusahakan antara lain adalah perlunya dukungan elite politik yang terdapat di daerah bersangkutan. Elite politik tersebut meliputi pimpinan daerah, pimpinan dinas dan instansi, serta anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat. Alasannya jelas karena elite politik inilah yang mengambil keputusan tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada daerah bersangkutan. Dengan demikian, bila para elite politik ini mempunyai komitmen yang kuat, maka pelaksanaan perencanaan pembangunan akan dapat terjamin dan demikian pula sebaliknya bilamana komitmen elite politik tersebut sangat rendah atau tidak ada sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Subang diperoleh keterangan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang beserta elit-elit DPRD Kabupaten Subang sangat berkomitmen dalam mengembangkan kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Subang. Keterangan serupa juga penulis peroleh dari informan BAPEDA Kabupaten Subang yang memperkuat pernyataan bahwa visi Kabupaten Subang sejak jauh Bupati Subang dan antar Bupati Subang berikutnya selalu dikaitkan dengan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Subang.

Keterangan informan diatas penulis pahami dengan beberapa hasil kajian dari beberapa dokumen di BAPEDA Kabupaten Subang bahwa arah kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Subang selalu menjadi perhatian dan deskripsi dokumen, seperti pada dokumen Renstra dan RKPD Kabupaten Subang. Penulis berpendapat bahwa persyaratan perencanaan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Subang yang berorientasi pada dukungan elite politik telah sangat baik. Diantara dokumen dimaksud seperti Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang.

Saat ini Kabupaten Subang sedang memacu program-program pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi, Kabupaten Subang. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Subang 2018-2023 merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan kabupaten Subang yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang periode 2018– 2023 adalah sebagai berikut : “Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”. Dalam rangka mengimplementasi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Program unggulan dimaksud adalah 9 Program JAWARA (Jaya, Istimewa dan Sejahtera) “ yaitu JAWARA NATA (Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Infrastruktur, serta Perhubungan), JAWARA NIAGA (Perindustrian, Perdagangan, dan KUMKM), JAWARA WISATA (Pariwisata dan Seni serta Budaya), JAWARA RAGA (Kependudukan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kesehatan), JAWARA DAYA (Pendidikan dan Keagamaan), JAWARA MIARA (Peternakan dan Perikanan), JAWARA PAKAYA (Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan), JAWARA RIKSA (Lingkungan Hidup) dan JAWARA NAGARA (Reformasi Birokrasi dan Hukum).

Subang Jawa adalah sebuah “Gelora Semangat” untuk menjadikan Kabupaten Subang bangkit hingga bisa menjadi daerah termaju di Jawa Barat pada tahun 2023. Dikerjakan oleh sumber daya manusia yang memiliki semangat dan keyakinan yang tinggi, didukung dengan potensi daerah yang dimiliki, ditopang dengan konsep pembangunan yang realistis, melalui proses yang terbuka dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Subang Jawa bukan hanya sebuah mimpi, tetapi akan menjadi sebuah realita.

Indikasi terwujudnya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Subang, ditandai dengan:

1. Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai daerah agribisnis;
2. Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai daerah industri yang maju;
3. Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai daerah pariwisata;
4. Terwujudnya pemerataan pembangunan Infrastruktur wilayah sebagai penunjang perekonomian dan pelayanan serta industri dan pariwisata;
5. Terwujudnya peningkatan daya dukung lingkungan dengan semakin efektif dan efisiennya sistem pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat.

2. Perlu adanya stabilitas politik.

Terdapatnya stabilitas politik, baik pada tingkat nasional maupun daerah, merupakan unsur lain yang diperlukan untuk dapat terjaminnya pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan. Misalnya bila tiba-tiba terjadi petukaran pemerintahan atau kepala daerah sebelum periode perencanaan berakhir, maka hal ini dapat mengancam kelanjutan pelaksanaan perencanaan tersebut. Kondisi ini dapat terjadi karena besar kemungkinan elite pemerintahan dan kepala daerah baru mempunyai pandangan lain dalam perencanaan pengembangan pariwisata bersangkutan. Hal yang demikian juga dapat terjadi bilamana terjadi huru hara besar bahkan peperangan yang dapat menyebabkan terhentinya kegiatan pembangunan pada daerah bersangkutan.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dari Dinas pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Subang diperoleh keterangan yang menegaskan tentang baiknya stabilitas politik di Kabupaten Subang. Bila dikaitkan dengan upaya untuk mengembangkan pariwisata hamper para elit di DPRD dan elit Pemerintah daerah memiliki keinginan politik yang sama untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Subang. Penulis juga memperoleh keterangan dari tokoh masyarakat yang menegaskan bahwa potensi wilayah Sariater dan sekitarnya sudah memberikan keyakinan para elit di Kabupaten Subang untuk memajukan destinasi wisata di Kabupaten Subang. Dari sisi stabilitas alam dan sosial di Kabupaten Subang sangat mendukung dan kondusif dalam mendorong aktivitas sector pariwisata. Diperoleh juga keterangan dari informan yang menjelaskan bahwa Kecamatan Subang, Kecamatan Cijambe, kecamatan Jalancagak, Kecamatan Ciater, Kecamatan Cisalak, Kecamatan Sagalaherang dan Kecamatan Tanjungsiang merupakan kecamatan yang berada dalam geografis kepariwisataan Subang selatan yang kondusif kehidupan sosial dan kemasyarakatannya.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa persyaratan yang kedua dari perencanaan pengembangan destinasi wisata yakni perlu adanya stabilitas politik sudah sangat baik. Kondisi yang stabil ini menurut penulis karena upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan semakin baik. Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat pembangunan sosial di Kabupaten Subang salah satunya diarahkan pada dua sasaran yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

Penulis berpendapat kondisi politik Kabupaten Subang yang stabil sangat tergambar dari Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Subang 2018-2023 merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Subang yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang periode 2018-2023 adalah sebagai berikut: “Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”. Visi tersebut di atas memiliki makna yang sangat dalam, mendasar serta strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Subang di satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati selama (lima) tahun kedepan. Dari perspektif inilah, visi tersebut memiliki makna yang dalam, yaitu: Bersih; Pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Profesional dan Proposional dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, serta pemerintahan dan masyarakat yang religius;

3. Perencanaan harus layak secara teknis.

Tidak dapat disangkal bahwa dokumen perencanaan pembangunan yang diperkirakan akan dapat terjamin pelaksanaannya di lapangan adalah perencanaan yang secara teknis layak dan operasional. Ini berarti bahwa perencanaan yang akan dapat dilaksanakan dalam praktik adalah perencanaan yang sasaran dan targetnya tidak muluk-muluk dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan dan sumber daya daerah bersangkutan dan sejalan dengan aspirasi masyarakat setempat secara keseluruhan.

Kelayakan teknis pertama yang perlu diperhatikan adalah menyangkut dengan data-data yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana tersebut. Bila data-data yang digunakan tidak cukup akurat, maka besar kemungkinan perencanaan yang disusun juga menjadi salah

sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, perencanaan harus selalu hati-hati dalam menggunakan data, walaupun berasal dari instansi resmi seperti badan pusat statistic (BPS) atau laporan dan informasi dari dinas dan instansi pemerintah. Kemampuan perencana dalam menilai kebenaran data akan turut pula menentukan kelayakan teknis perencanaan bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari beberapa informan diperoleh keterangan bahwa kondisi dan potensi Kabupaten Subang dalam bidang kepariwisataan selalu didasarkan kepada keadaan data dari potensi Kabupaten Subang itu sendiri. Dikemukakan atas hasil wawancara dan survey penulis bahwa potensi Kabupaten Subang sangat strategis dengan keadaan geografis, topografis, social dan budayanya. Luas Wilayah Kabupaten Subang adalah 2.051,76 km² atau sekitar 6,34 persen dari luas Provinsi Jawa Barat, sedangkan ketinggian antara 0 – 1500 mdpl. Dari sisi administratif, wilayah Kabupaten Subang terdiri atas 30 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 245 desa dan 8 kelurahan, adapun pusat pemerintahan berada di Kecamatan Subang. Wilayah Kabupaten Subang secara geografis terbagi menjadi tiga bagian, yakni wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara. Bagian selatan wilayah Kabupaten Subang terdiri atas dataran tinggi/pegunungan, bagian tengah berupa dataran, sedangkan bagian utara merupakan dataran rendah yang mengarah langsung ke Laut Jawa. Kabupaten Subang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 31' - 54' Bujur Timur dan 11' - 49' Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah secara geografis adalah sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung Barat dan Kab. Bandung

Sebelah Barat : Kabupaten Purwakarta dan Karawang.

Sebelah Utara : Laut Jawa.

Sebelah Timur : Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Letak geografis yang berdekatan dengan Ibukota Provinsi dan Ibukota Negara serta berada pada lintasan jalur transportasi pantura Jawa Barat menjadikan Kabupaten Subang memiliki nilai tambah berupa kemudahan akses yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan daerah. Kabupaten Subang mencakup 3 zona, yaitu:

a. Daerah pegunungan (Subang bagian selatan)

Daerah ini memiliki ketinggian antara 500-1500 mdpl dengan luas 41.035,09 Ha atau 20 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Wilayah ini meliputi Kecamatan Jalancagak, Ciater, Kasomalang, Cisolak, Sagalaherang, Serangpanjang dan Tanjungsiang.

b. Daerah berbukit dan dataran (Subang bagian tengah)

Daerah dengan ketinggian antara 50-500 mdpl dengan luas wilayah 71.502,16 Ha atau 34,85 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Zona ini meliputi wilayah Kecamatan Cijambe, Subang, Cibogo, Kalijati, Dawuan, Cipeundeuy, Purwadadi, Cikaum dan sebagian Pagaden Barat.

c. Daerah dataran rendah (Subang bagian utara) Dengan ketinggian antara 0-50 mdpl dengan luas 92.639,7 a atau 45,15 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Wilayah ini meliputi Kecamatan Pabuaran, Pagaden, Binong, Cipunagara, Comprang, Ciasem, Pusakanagara, Pusakajaya, Pamanukan, Sukasari, Legonkulon, Blanakan, Patokbeusi, Tambakdahan, dan sebagian Pagaden Barat.

Dengan kondisi topografi tersebut, maka kawasan permukiman pada umumnya berlokasi di daerah yang relatif datar, dan kemungkinan arah pengembangan permukiman ke daerah-daerah yang bertopografi dan berkontur datar. Tidak menutup kemungkinan kebutuhan terhadap permukiman semakin hari semakin meningkat. Hal ini yang perlu mendapat perhatian khususnya bahaya tanah longsor/banjir pada daerah permukiman yang dibangun pada daerah dengan topografi dan kontur yang tajam/curam, serta bahaya banjir pada daerah hilir atau pantai utara Subang.

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Subang terdiri dari 3 jenis, yaitu: air permukaan, air tanah, dan mata air. Daya dukung sumber daya air suatu wilayah merupakan parameter perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air, atau dapat didefinisikan sebagai kemampuan maksimal wilayah menyediakan air bagi penduduknya dalam jumlah tertentu beserta kegiatannya.

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Subang Tahun 2018 mencapai 1.579.018 jiwa atau 11,58 persen dari penduduk Jawa Barat. Sedangkan kepadatan penduduknya yaitu 762/km². Laju pertumbuhan penduduk mengalami sedikit penurunan pada periode 2016-2017, dari 1,09 persen menjadi 1,07 persen.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang 2005-2025, Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang adalah : “Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata, Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Religius serta Berbudaya melalui Pembangunan berbasis Gotong Royong Pada Tahun 2025”. Posisi Subang sebagai daerah lumbung pangan nasional dan masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) PURWASUKA dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029 menjadikan Subang memiliki potensi pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa potensi yang sangat strategis Kabupaten Subang selalu memberikan kekuatan dalam mengembangkan destinasi pariwisata di Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, hasil survey data potensi daerah dan telaahan penulis dapat disimpulkan bahwa syarat ketiga bahwa perencanaan harus layak secara teknis sudah sangat baik.

4. Kemampuan administrasi daerah yang bersangkutan.

Kesuksesan pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan akan sangat ditentukan pula oleh kemampuan administrasi yang terdapat pada daerah bersangkutan. Bila kemampuan administrasi daerah ternyata cukup baik, maka besar kemungkinan perencanaan pembangunan akan terjamin pelaksanaannya dan demikian pula sebaliknya bila kemampuan administrasi daerah tersebut ternyata sangat lemah. Sebegitu jauh kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa kemampuan administrasi yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia pada umumnya masih relative lemah. Kemampuan administrasi daerah tersebut ditentukan oleh berbagai faktor. Pertama, kualitas aparatur yang melaksanakan administrasi tersebut baik tingkat Pendidikan dan pengalaman serta termsuk moral yang dimiliki. Kedua, kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan

yang berlaku di bidang administrasi dan kepegawaian. Ketiga, ketersediaan prasarana seperti Gedung dan kantor dan sarana seperti peralatan serta teknologi informasi yang dimiliki oleh kantor tersebut. Keempat, keseriusan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan daerah yang akan mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan administrasi pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan di Kecamatan dan Desa tentang persyaratan keempat yakni kemampuan administrasi bahwa kualitas aparatur, kepatuhan terhadap hukum, ketersediaan prasarana Sebagian besar masih memiliki banyak kendala terlebih di era pandemic corona 19. Kendala yang di hadapi misalnya berkaitan dengan keterbatasan peralatan serta teknologi informasi. Pengembangan destinasi wisata yang berada di desa-desa dan kecamatan juga dihadapkan pada kerusakan jalan yang belum mendukung jalannya lalu lintas ke arah obyek wisata. Sistem informasi dalam mempromosikan potensi pariwisata yang ada di desa-desa dan kecamatan belum optimal.

Penulis berpendapat bahwa persyaratan yang keempat dalam perencanaan destinasi wisata yakni kemampuan administrasi daerah yang bersangkutan masih belum efektif. Sarana Pariwisata adalah segala sesuatu yang melengkapi dan bertujuan untuk memudahkan proses kegiatan pariwisata dapat berjalan lancar (Ghani, 2015). Sarana kepariwisataan dibagi menjadi tiga kelompok, diantaranya (Yoeti, 2012) : Sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Travel agent, . Tour operator, Angkutan wisata, rumah makan, akomodasi, obyekwisata dan atraksi wisata. Sarana Pelengkap Kepariwisataan (Suplementing Tourism Superstructure) Yaitu perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah :a. Sarana Olahraga dan b. Sarana pariwisata sekunder, dan amusement lainnya.

Sarana Penunjang Kepariwisataan (Supporting Tourism Superstructure) Sarana pelengkap dan sarana pokok dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi memiliki fungsi lain yaitu, membuat wisatawan atau pengunjung daerah tujuan wisata lebih banyak mengeluarkan dan membelanjakan uangnya di tempat tujuan wisata yang mereka kunjungi. Prasarana pariwisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya (Suwanto, 2004), sedangkan menurut Menurut Warpani (2007) prasarana diantaranya : 1. Aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan daya hubung antar zona yang wujudnya berupa jalan raya dan jaringan angkutan. Aksesibilitas merupakan faktor penting dalam proses berwisata, tingkat kemudahan untuk menjangkau suatu kawasan wisata dilihat dari aksesibilitas yang berupa kondisi jalan raya dn lain-lain. Sarana Pelengkap Kepariwisataan (Suplementing Tourism Superstructure) Yaitu perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah :a. Sarana Olahraga dan b. Sarana pariwisata sekunder, dan amusement lainnya ketersediaan moda angkutan untuk menuju kawasan wisata tersebut. Peningkatan aksesibilitas berarti mempersingkat waktu dan biaya perjalanan. Yang termasuk kelompok utilitas adalah : ketersediaan sumber energi listrik adalah

prasyarat bagi pengembangan industri pariwisata. Tetapi harus diperhatikan penggunaannya. Tidak semua kawasan wisata membutuhkan listrik, atau hanya membutuhkan sedikit energi listrik, Air bersih, persediaan air minum, Toilet, Mushola, Jaringan pelayanan (Pelayanan kesehatan dalam bentuk pos kesehatan atau persediaan P3K dan Keamanan, dalam bentuk Pos keamanan beserta pihak keamanan atau oknum petugas, agar terhindar dari tindakan- tindakan kriminal selama berada di kawasan wisata).

5. Melakukan penyesuaian rencana (Planning Adjustment).

Persyaratan selanjutnya yang diperlukan untuk dapat menjamin pelaksanaan dari rencana tersebut adalah bahwa perencanaan tersebut harus selalu dapat disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi daerah bersangkutan. Hal ini diperlukan mengingat kondisi sosial ekonomi dan politik selalu mengalami perubahan yang cukup drastic. Di samping itu, undang-undang dan peraturan berlaku serta kebijakan nasional juga sering berubah yang otomatis mempengaruhi kondisi daerah. Akibatnya perubahan tersebut, dokumen perencanaan yang sudah di susun dan ditetapkan sebelumnya menjadi tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi daerah dewasa ini.

Penyesuaian rencana tersebut dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu melalui revisi perencanaan (mid-term review) setelah menjalani suatu periode tertentu dan menyusun rencana tahunan (annual plan) secara rutin setiap tahunnya. Penyesuaian rencana dapat dilakukan terhadap rencana jangka Panjang daerah (RPJPD) seteleah 10 tahun berjalan dan ternyata sudah banyak perubahan kondisi sosial ekonomi dan politik. Sedangkan untuk rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) penyesuaian dapat dilakukan seteleah perencanaan berjalan sekitar 2-3 tahun. Namun demikian, penyesuaian rencana tersebut dapat dilakukan lebih awal karena terjadi suatu bencana alam yang mengubah kondisi secara drastic seperti terjadinya tsunami di acaeh atau gempa besar di Yogyakarta dan padang beberapa tahun yang lalu.

Penyesuaian rencana melalui penyusunan rencana tahunan yang dilakukan secara rutin, merupakan cara yang lazim digunakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dewasa ini. Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 diamanatkan bahwa setiap tahunnya daerah daerah harus menyusun RKPD oleh Bappeda yang merupakan jabaran lebih konkret dari RPJMD dan Renja oleh masing-masing SKPD yang merupakan jabaran dari Renstra SKPD yang sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwa perencanaan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Subang selalu disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. Apalagi dalam situasi pandemic misalnya ketentuan-ketentuan protokol Kesehatan sangat mempengaruhi manajemen kepariwisataan. Perencanaan kepariwisataan yang berada dibawah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Subang selalu menguikuti ketentuan perencanaan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Kebijakan RENSTRA, APBD Kabupaten Subang sangat mempengaruhi bagaimana Donas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga menjalankan atau mengimplementasikan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Subang. Penulis berpendapat bahwa persyaratan kelima yakni Melakukan penyesuaian rencana (Planning Adjustment) sudah diperhatikan.

6. Menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Persyaratan penting lainnya yang perlu di upayakan guna menjamin pelaksanaan suatu rencana adalah menjaga konsistensi antara penyusunan anggaran dengan dokumen perencanaan yang sudah ada, terutama RKPD. Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu bahwa sesuai dengan ketentuan dan perundangan berlaku, RKPD adalah dasar utama dalam penyusunan RAPBD. Bila konsistensi ini dapat dijaga, maka pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan menjadi lebih terjamin karena pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran secara teoritis sudah lama ada dalam ilmu perencanaan pembangunan yang terkenal dengan istilah *planning, program and budgeting system (PPBS)*. Namun demikian pelaksanaannya ternyata cukup sulit karena adanya berbagai kepentingan yang terlibat di dalam. Berubah setelah undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dikeluarkan, maka hal ini sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan oleh para dinas dan instansi yang terlibat.

Banyak hal yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut. Pertama, penyusunan RKPD itu sendiri sejak awal sudah tidak konsisten dengan penyusunan RAPBD, walaupun kedua dokumen tersebut disusun oleh Lembaga yang sama yaitu Bappeda. Kedua, karena terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia sehingga dapat didukung dengan anggaran. Ketiga, adanya kekuatan tertentu baik yang berada pada eksekutif maupun legislatif yang mengubah program dan kegiatan yang telah direncanakan berikut anggarannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan diperoleh keterangan bahwa kondisi anggaran APBN dan APBD ditengah Covid 19 sangat terbatas. Prioritas anggaran lebih diarahkan untuk penanganan covid 19 termasuk di sektor kepariwisataan. Peranan sector swasta dalam membantu anggaran juga lebih diarahkan dalam penanganan covid 19. Dalam memenuhi persyaratan; Menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran masih terkendala dengan adanya wabah covid 19. Dengan demikian menurut penulis persyaratan ini belum efektif. Pengembangan destinasi pariwisata kedepan perlu dukungan pembiayaan dengan pengembangan sector penanaman modal baik dalam maupun luar negeri. Penulis mendapatkan data tentang penanaman modal kita saat ini masih mengandalkan pada bidang perijinan.

Hingga Tahun 2017 pelayanan perijinan di DPMPSTP masih berdasar pada Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PPTSP, yang menyelenggarakan 11 jenis perijinan. Selanjutnya PPTSP akan mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2013, yang akan melayani perijinan meliputi seluruh urusan, namun rinciannya masih menunggu peraturan pelaksanaanya berbentuk Peraturan Bupati.

7. Optimalisasi peran serta masyarakat.

Optimalisasi peran serta masyarakat juga dapat berperan untuk lebih menjamin terlaksananya perencanaan bersangkutan. Alasannya adalah karena karena bilamana perencanaan tersebut dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat umum, maka kemungkinan protes dari masyarakat sangat kecil. Dalam hal ini rasa memiliki masyarakat terhadap proyek-proyek pemerintah akan dengan sendirinya muncul dan mereka akan cenderung mendukung pelaksanaan program dan proyek-proyek pemerintah daerah. Di samping itu, masyarakat juga akan senang

dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga mereka akan cenderung tidak menghalangi pelaksanaan proyek-proyek pemerintah berada di daerah tempat tinggalnya. Bila hal ini dapat diwujudkan, maka pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam masyarakat akan menjadi lebih terjamin.

Untuk dapat meningkatkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tersebut haruslah dilakukan secara partisipatif (*participatory planning*). Untuk keperluan ini, maka dalam proses penyusunan rencana pembangunan tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan (*MUSRENBANG*) perlu dilakukan sebaik mungkin dengan melibatkan para tokoh dan pemuka masyarakat. Melalui *MUSRENBANG* tersebut semua kritikan dan masukan para tokoh masyarakat tersebut harus diakomodasi sebaik mungkin pada waktu melakukan perbaikan rancangan dokumen perencanaan setelah dilakukan *MUSRENBANG* tersebut.

Selanjutnya pada tahap penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (*RAPBD*), sebelum pengesahan dilakukan, DPRD wajib melakukan *dengar pendapat* (*public hearing*) dengan masyarakat untuk mengetahui apakah *RAPBD* tersebut sudah sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat secara umum, *dengar pendapat* ini dapat dilakukan melalui suatu pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan cerdik pandai yang terdapat pada daerah bersangkutan dimana rancangan *RAPBD* tersebut dibahas secara mendalam. Seandainya ada masukan dan kritikan dari masyarakat dalam pertemuan tersebut, maka DPRD wajib memperbaiki rancangan *RAPBD* tersebut sesuai dengan masukan dan kritikan dalam *dengar pendapat* tersebut.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa *MUSRENBANG* tersebut ada di lakukan oleh Bappeda setempat secara berkala sebelum memfinalkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, pada satu pihak, pelaksanaannya terkesan lebih banyak bersifat seremonial dan formalitas saja dan tidak banyak kritikan dan masukan masyarakat akomodasi dalam perbaikan rencana. Sedangkan di pihak lain, para tokoh masyarakat sendiri juga kurang serius memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah daerah tersebut. Kondisi terlihat dari kurang banyaknya tanggapan masyarakat terhadap konsep perencanaan yang disampaikan dan masukan kritikan tersebut juga kurang konkret dan bermanfaat.

8. Melakukan monitoring dan evaluasi

Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, tugas badan perencana bukanlah terbatas hanya pada penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan saja, tetapi juga mencakup kegiatan monitoring (*pengendalian*) dan evaluasi. Dalam praktiknya kedua kegiatan ini sering kali disatukan yang lazim dikenal dengan istilah monitoring dan evaluation (*MONEV*). Kedua kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk dapat menjamin agar apa yang telah direncanakan semula akan dapat dilaksanakan secara baik dilapangan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Kegiatan pemantauan atau *pengendalian* pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan setelah dokumen perencanaan selesai disusun dan ditetapkan. Tujuan dan sasaran utama kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan dilapangan benar-benar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini dapat diupayakan dengan jalan mengikutsertakan aparat perencanaan dalam proses tender dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Dengan cara demikian, aparat perencanaan akan dapat memantau kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya, para pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pembangunan untuk

menyesuaikan kegiatan yang akan atau sedang dilakukan dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan terdahulu.

Kegiatan evaluasi adalah proses penilaian manfaat dan dampak yang dilakukan setelah program dan kegiatan sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan selama beberapa tahun dalam masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui secara rinci seberapa jauh sasaran yang direncanakan semula dapat diwujudkan dalam masyarakat melalui pembangunan dan pemanfaatan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. Bilamana sasaran tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, perlu pula dijelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi dan faktor penyebabnya. Kesemuanya ini diperlukan untuk menetapkan penyesuaian kebijakan yang perlu dilakukan dimasa datang untuk menjamin terlaksananya rencan pembangunan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi memerlukan surevei, wawancara dan pengamatan langsung ke lapangan di mana program dan kegiatan tersebut dilakukan. Aspek yang perlu diteliti antara lain adalah seberapa jauh program dan proyek tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Di samping itu, perlu pula diteliti apa manfaat yang dihasilkan dan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan program dan kegiatan tersebut dalam masyarakat. Agar evaluasi ini lebih bersifat objektif, sebaiknya digunakan indikator kinerja (performance indicators) yang tidak hanya bersifat kualitatif, tetapi juga kuantitatif dengan menggunakan indikator kinerja yang sudah ditetapkan terdahulu dalam dokumen perencanaan.

Ada dua bentuk Teknik dan metode evaluasi kinerja yang lazim digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan sebuah rencana pembangunan daerah. Kedua metode tersebut adalah: evaluasi kinerja makro dan evaluasi kinerja program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan evaluasi yang lebih sempurna dan teliti, sebaiknya kedua metode ini dilakukan secara Bersama-sama sehingga hasil evaluasi keduanya dapat saling mengisi satu sama lainnya. Metode evaluasi kinerja makro pada dasarnya bertujuan untuk menilai seberapa jauh target sasaran makro yang telah ditetapkan semula dalam dokumen perencanaan dapat dicapai setelah beberapa periode waktu tertentu. Sasaran makro tersebut biasanya mencakup pertumbuhan ekonomi daerah berikut rinciannya untuk masing-masing sektor dan subsector, perkembangan jumlah ekspor dan impor, realisasi jumlah investasi asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), penurunan jumlah pengangguran, pengurangan jumlah penduduk miskin dan indikator makro terkait lainnya. Dalam hal ini tolok ukur yang digunakan adalah dalam bentuk beberapa indikator pembangunan yang lazim digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan dan hasil observasi dapat dikemukakan bahwa evaluasi perencanaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas Disparpora Kabupaten Subang. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Disparpora selalu melaksanakan fungsi evaluasi untuk memperbaiki rencana kerja Dinas sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Subang.

Beberapa data yang penulis peroleh atas hasil evaluasi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Subang meliputi :

Dilihat dari sasarannya adalah :

- Tenaga kerja pemerintahan Kab. Subang sebagai fasilitator terhadap perkembangan destinasi pariwisata Subang. Terutama Dinas Pariwisata sebagai leading sektor terkait.
- Pemerintahan desa wisata sebagai pemegang komitmen.
- KOMPEPAR/POKDARWIS.

- Masyarakat yang berada di sekitaran destinasi dan desa wisata (pengelola desa wisata, pengelola homestay, tour guide local, UMKM, pedagang kaki lima, pengrajin kuliner)
- Pengelola DTW (Daerah Tujuan Wisata).
- Pengelola (tenaga kerja) hotel, restoran, dan industri jasa lainnya.
- Mojang Jajaka sebagai duta wisata.
- Para komunitas yang menunjang pariwisata (HPI, Genpi, PHRI, BPPD, EKRAF) dan komunitas lainnya.

Pengembangan SD Pariwisata Budaya diperoleh data sebagai berikut :

Pengembangan SDM Pariwisata Budaya

Tujuan

- Local culture (budaya lokal)
- Kerjasama antar sanggar/paguyuban
- Sinergitas antar dinas budaya dan pariwisata.

Sasaran

- Ahli budaya.
- Para pelaku seni (budayawan dan seniman).

Kendala

- Tidak ada sinergitas antara dinas dengan pelaku budaya.
- Kurangnya inventarisir terhadap para ahli budaya dan pelaku seni.

Peluang

- Budaya dijadikan *core product* Kab. Subang selain desa wisata
- Keterkaitan antara desa wisata dengan budaya.

Pengembangan industri pariwisata dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

Pengembangan Industri Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Subang untuk meningkatkan jumlah wisatawan (kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara) sangat besar, selain memiliki amenities yang mendukung dan pariwisata sebagai salah satu industri yang menarik dan menguntungkan.

Amenitas dan industri pariwisata, selain meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Subang juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Amenitas dan industri pariwisata tersebut seperti: hotel, restoran, tempat hiburan.



Dilihat dari pengembangan destinasi wisata diperoleh data sebagai berikut :



Wisata Alam

- Curug Cibareubeuy
- Curug Ciangin
- Curug Cijalu
- Curug Cileat
- TW Tangkuban Perahu
- Capolaga
- Pantai Cirewang
- Pantai Pondok bali
- Air panas sari ater
- Bukit pamoyanan

Pengembangan Destinasi Wisata Subang



Wisata Buatan

- Kolam renang tirta alam
- Kolam renang Ciheuleut
- Kolam renang Citapen
- Waterboom Ciereng
- Waterpark Kumpay
- Paralayang bukit santiong



Wisata Budaya

- Ruwatan Bumi
- Kamp. adat banceuy
- Ruwatan /pesta laut nadran
- 7 sungai



Desa Wisata Cibeusi

Desa Wisata Cibeusi merupakan salah satu dari 7 desa di Kec. Ciateur, Kabupaten Subang, yang terletak kurang lebih 3 km ke arah timur dari Taman Wisata Alam Pemandian Air Panas Sari Ater. Desa Cibeusi berada di ketinggian 900 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah kurang lebih 3,64 km², dengan suhu rata-rata harian di daerah Desa Cibeusi adalah 32,49°C. Panorama yang indah dengan banyaknya destinasi-destinasi wisata yang ada di Desa Cibeusi, menjadikan Desa Cibeusi sebagai Desa Wisata percontohan bagi desa-desa yang ada di Kecamatan Ciateur. Desa ini juga menawarkan beberapa paket Desa wisata.

Kampung Senyum

Kampung Senyum adalah tempat wisata di tengah hutan yang terletak di Nagrak, Ciateur, Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Desa Cibeusi yang memiliki pesona alam yang indah. Tidak jauh dari Kampung Senyum terdapat Curug Cibareubeuy.

Di Kampung Senyum selain tersedianya saung khas sunda juga disediakan pula homestay untuk menginap bagi para wisatawan yang ingin bermalam, dengan suasana keheningan dan kenyamanan jauh dari keramaian. Saat berada di Kampung Senyum, wisatawan akan disuguhkan dengan kesenian musik tradisional khas sunda.

Kampung Panineungan

Di Desa Wisata Cibeusi juga akan alaminya yang mempesona dengan curug-curugnya. Selain Kampung Senyum yang berada di Desa Cibeusi terdapat pula Kampung Panineungan. Kampung ini juga menyediakan homestay bagi para wisatawan yang ingin menginap, tidak jauh dari lokasi Kampung Panineungan terdapat juga curug yang bernama Curug Ciangin. Wisatawan akan merasakan gemuruhnya air baik siang maupun di malam hari sehingga menambah suasana ketenangan.

Paket Wisata Ngaparak Desa Cibeusi

PAKET WISATA NGAPRAK CURUG CIBAREUBEUY:

- 30 Orang (Minimal), harga Rp. 227.000 per orang
- 40 Orang, harga Rp. 199.000 per orang
- 50 Orang, harga Rp. 185.500 per orang
- 60 Orang (atau lebih), harga Rp. 176.500 per orang

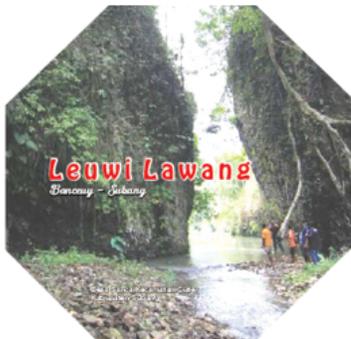
Penyambutan + kesenian tradisional, welcome drink + snack tradisional, makan siang, coffe break, fun game, tiket masuk curug, jasa kesenian tradisional, dan jasa pemandu wisata. Kunjungan wisata ke edukasi pembuatan gula aren, kampung senyum, Curug Cibareubeuy, pusat oleh-oleh (kuliner) khas Desa Wisata Cibeusi, serta penutupan kegiatan tour dan foto bersama.

PAKET WISATA NGAPRAK CURUG CIANGIN:

- 30 Orang (Minimal), harga Rp. 185.000 per orang
- 40 Orang, harga Rp. 170.000 per orang
- 50 Orang, harga Rp. 165.000 per orang
- 60 Orang (atau lebih), harga Rp. 155.000 per orang

Penyambutan + upacara adat, welcome drink + snack tradisional, makan siang, coffe break, fun game, tiket masuk curug, jasa kesenian tradisional, dan jasa pemandu wisata. Kunjungan wisata ke TBM Sari Ater, wisata ziarah eyang raden, wisata alam curug ciangin (beul lawang, curug nagla bongkok, pancuran 7, curug ciangin, dan babakan mura jambu), kampung panineungan, kesenian tradisional goong renteng, kerajinan dan galeri IMOCraft, serta penutupan kegiatan tour dan foto bersama.

Tersedia juga paket wisata lainnya seperti:
Paket Outbound, Hiking ke Curug Cibareubeuy, Camping di Curug Ciangin / Curug Cibareubeuy, Wisata Sepeda Gunung Track Wates - Curug Ciangin, dan paket wisata lainnya.



Kampung Adat Banceuy

Awalnya Kampung Banceuy adalah kampung dinamakan Kampung Nglia. Sekitar tahun 1800 di Kampung Nglia terjadi angin puting beliung memporandakan Kampung Nglia. Setelah bencana alam reda, ke tujuh tokoh Kampung Nglia (Eyang Ita, Aki Leutik, Eyang Malm, Aki Alnan, Eyang Ono, Aki Uli, dan Aki Anlam) itu Ngabanceuy atau musyawarah untuk menanggapi bencana alam tersebut. Sesuai dengan kesepakatan bersama, ke tujuh tokoh tersebut memberikan nama baru bagi kampungnya yang telah disepakati adalah Kampung Banceuy.

Kampung Banceuy berada di Subang Selatan tepatnya di Desa Sanca Kecamatan Clater Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Jarak tempuh menuju ke Kampung Banceuy dari pusat Kota Subang yaitu sekitar 30 Km dan 32 Km dari Bandung.

UPACARA ADAT

> **Ruwatan Bumi** atau **Ngarawat Bumi** berasal dari kata rawat atau ngarawat (bahasa Sunda) yang artinya mengumpulkan atau memelihara, secara umum memiliki makna yaitu mengumpulkan seluruh masyarakat serta mengumpulkan seluruh hasil bumi, baik bahan mentah, selangkah jadi maupun yang sudah jadi. Ruwatan Bumi biasa dilaksanakan pada hari rabu terakhir di bulan Rayagung (Dzulhijah) pada setiap tahunnya. Rayagung (Dzulhijah) pada setiap tahunnya.

> **Hajat Wawar**, pengrajin secara massal ialah suatu cara adat yang dilakukan oleh masing-masing lingkungan di setiap wilayah Kampung Adat Banceuy. Sesajian dalam hajat wawar yang paling khas adalah sawen. Sawen tersebut terdiri dari daun darangan, daun tianang, dan jakut palias.

> **Hajat Mulud Aki Leutik** (nama aslinya Raden Ismail Shaleh) merupakan hajat syukuran yang diselenggarakan khusus oleh keturunan keluarga Aki Leutik dengan tujuan meningkatkan rasa syukur dan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Dan masih banyak upacara adat yang biasa dilaksanakan di Kamp. Adat Banceuy

KESENIAN



KAULINAN BARUDAK



PAKET DESA WISATA

PAKET A:

1 hari 1 malam, harga Rp. 150.000/orang minimal untuk 50 orang.

Tari penyambutan, welcome drink, makan siang, makan malam, dan makan pagi. Kunjungan kuliner, hiking, berkunjung ke pengrajin, edukasi pertanian, dan edukasi kesenian.

PAKET B:

1 hari harga Rp. 80.000/orang minimal untuk 50 orang.

Welcome drink, makan siang, hiking, edukasi pertanian, dan edukasi kesenian.

Berdasarkan data-data diatas penulis berpendapat bahwa tingkat partisipasi dalam perencanaan sudah baik tetapi masih perlu dioptimalkan. Kebijakan yang saat ini yang perlu dioptimalkan terutama destinasi desa wisata di Kabupaten Subang karena tangan menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Salah satu ciri dari desa yang masih berada dalam tingkatan Desa Berpotensi untuk tingkatan desa wisata adalah masih adanya masyarakat yang kurang memahami potensi yang berada di desanya. Perlu adanya pemahaman bagi warga untuk memahami manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata yang mana mungkin tidak semua akan menerima pada awalnya. Oleh karena itulah, perlu adanya penjelasan atau penyampaian mengenai 4 manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata yang nantinya akan dirasakan oleh warga.

Manfaat tersebut juga perlu dijelaskan dalam jangka pendeknya, jangka panjangnya hingga beberapa desa yang bisa dijadikan percontohan sebagai desa wisata yang sukses. Berikut ke lima manfaatnya tersebut :

1. Tingkat Hidup Masyarakat Maju dan Budaya Serta Tradisi Dapat Lestari

Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata yang tentunya akan langsung memberikan dampak positif bagi warga tentu saja adalah dampak positif bagi tingkat kehidupan warga yang dalam hal ini seperti mampu memunculkan lapangan kerja baru hingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui fasilitas desa yang diperbaiki agar layak dikunjungi. Selain itu manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata lainnya adalah dapat menghidupkan budaya, tradisi atau lingkungan adat sebagai salah satu komoditas wisata budaya lokal yang juga menjaganya agar tetap lestari. Karena umumnya, budaya atau tradisi ini sulit untuk dilestarikan karena mulai hilangnya ketertarikan pada budaya tersebut.

2. Manfaat Perekonomian Bagi Masyarakat Pedesaan.

Selain manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata dalam hal tingkat hidup masyarakat serta pelestarian budaya, manfaat yang akan diterima oleh masyarakat selanjutnya adalah tentu saja dalam hal perekonomian. Perlu dijelaskan pula manfaat desa wisata ini untuk

perekonomian secara langsung maupun secara tidak langsung bagi masyarakat serta apa dampak jangka pendek dan panjangnya. Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata di sisi perekonomian secara langsung adalah keuntungan yang diperoleh dari objek wisata yang ditawarkan.

Sedangkan untuk manfaat tidak langsungnya adalah meningkatkan kunjungan ke desa sehingga perputaran perekonomian seperti dari hasil penjualan produk lokal bisa semakin lancar atau bahkan dikirim ke luar desa.

3. Meningkatkan Keberadaan Industri Kecil Menengah.

Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata selanjutnya adalah peningkatan industri kecil menengah yang memanfaatkan produk lokal sebagai bahan mentahnya. Hal ini juga berhubungan erat dengan poin pertama serta poin kedua dari manfaat pengembangan desa wisata yakni meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan dari meningkatnya tingkat perekonomian.

4. Promosi Produk Lokal

Selanjutnya untuk manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata adalah sebagai sarana promosi produk lokal. Selain meningkatkan pemanfaatan SDA seperti lokasi wisata, keberadaan desa wisata juga dapat memberikan manfaat untuk promosi produk lokal. Promosi produk lokal ini bisa menjadi sebuah ciri khas dari desa yang mana diharapkan juga akan meningkatkan penjualan.

Dengan ke empat manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata yang dapat dipaparkan secara langsung, diharapkan warga dapat menerima gambaran singkat bagaimana melalui wawasan baru tersebut serta strategi yang ada dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan mengembangkan desa ke arah yang lebih baik seperti dari sisi perekonomian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan diantaranta sebagai berikut: Potensi pariwisata di Kabupaten Subang untuk meningkatkan jumlah wisatawan (kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara) sangat besar, selain memiliki amenities yang mendukung dan pariwisata sebagai salah satu industri yang menarik dan menguntungkan. Amenitas dan industri pariwisata, selain meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Subang juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Amenitas dan industri pariwisata tersebut seperti: hotel, restoran, tempat hiburan.

Perencanaan pariwisata sangat diperlukan baik pada tingkat Internasional, Nasional, Regional, Subregional dan Resort (kawasan, dan tapak), maupun desain dan perencanaan fasilitas, hal ini karena; (1) Fenomena pariwisata makin kompleks dari yang pernah terfikir sebelumnya. (2) Pariwisata berdampak positif dan negatif. (3) Pariwisata makin kompetitif dan promosi destinasi wisata makin gencar. (4) Pariwisata dapat berakibat buruk pada sumberdaya alam dan budaya. (5) Pariwisata dapat mempengaruhi semua orang dalam komunitas tertentu dan semua yang terlibat dalam pariwisata perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. (6) Pariwisata memerlukan penanganan secara khusus baik dalam aspek organisasional, marketing, promosi, maupun regulasi.

Konsekuensi dari pengembangan pariwisata tanpa perencanaan pasti akan dapat menyebabkan dampak fisik, dampak sosial budaya (manusia), dampak pemasaran yang berlebihan atau kurang, dampak pengorganisasian yang kurang dan dampak lainnya.

Perencanaan pada dasarnya adalah memilih alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan organisasi serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki organisasi dan kendala-kendala yang dihadapi. Untuk tujuan tersebut manajemen harus mengetahui data yang relevan terutama yang menyangkut penghasilan dan beban di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan merupakan suatu proses penentuan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dimasa yang akan datang untuk menghadapi berbagai ketidakpastian dan pemilihan alternatif-alternatif yang mungkin terjadi. Perencanaan dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan keadaan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan harus mempunyai kemampuan melkakukan pilihan-pilihan terbaik yang dapat dilaksanakann untuk menghindari kegagalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mathis. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi pertama, Cetakan pertama. Yogyakarta : Salemba Empat
- McMillan & Schumacher. 2003. Real Estate Development : Principles And Process, Third Edition, Urban Land Institut, Washington DC
- Nafarin, M, 2010. Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat
- Nugroho Adi. 2005. Analisis dan Perancangan Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha. Ilmu.
- Peterson Anya. 1990. The Antropology of Dance terjemahan F.X Widaryanto. Bandung : STSI Press
- Rivai Veithzal, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Robbins. 2006. Perilaku Organisasi (Organizational behavior). Edisi Indonesia Jilid 1 . Jakarta: PT Indeks Gramedia Grup.
- Siswanto Bedjo. 2000. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sjafrijal, 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Straus dan Corbin, 2003, Dasar - Dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudjana Nana. 2006. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiono, 2009, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta
- Supriono,R.A, 2008. Akuntansi biaya: Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan, Yogyakarta : BPF E
- Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Prenada Media
- Syah Muhibbin. 2005. Psikolog pendidikan dengan Pendekatan Baru . Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wagonhurst, Carole, 2002, Developing Effective Training Programs. The Journal of Research Administrati on, Volume XXXIII, Number II